

MODEL PENELITIAN POLITIK

Mohammad Ridho Fathi *¹
Desti Amanda²
Salsa Nabila³
Wahyu Hidayat⁴

^{1,2,3,4}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*e-mail: ridhofathi0201@gmail.com¹, Destiamanda232@gmail.com², Salsanbl01@gmail.com³,
wahyu.hidayat@uinbanten.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas model penelitian politik yang mengkaji eksistensi prinsip politik Islam dalam kerangka sosial dan politik kontemporer. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip politik Islam yang relevan, memahami karakteristik model penelitian politik yang efektif, menetapkan ruang lingkup penelitian, dan mendiskusikan metode implementasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-methods approach*) yang menggabungkan analisis kualitatif untuk memahami konsep dan konteks prinsip politik Islam, dan analisis kuantitatif untuk mengukur dampaknya pada kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Karakteristik model penelitian politik yang diajukan melibatkan sintesis teori politik dan studi agama, menciptakan landasan konseptual yang kokoh untuk penelitian ini. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini mengidentifikasi varietas prinsip politik Islam dan mendefinisikan parameter yang digunakan untuk mengukur eksistensinya dalam konteks politik modern. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis mendalam terhadap aspek-aspek kunci seperti implementasi syariah, partisipasi politik perempuan, dan nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum.

Kata kunci: Penelitian Politik, Metodologi Penelitian, Eksistensi Politik Islam, Prinsip-Prinsip Dasar Politik, Karakteristik Model Penelitian Politik, Ruang Lingkup.

Abstract

This research discusses a political research model that examines the existence of Islamic political principles in a contemporary social and political framework. The main focus of the research is identifying relevant Islamic political principles, understanding the characteristics of effective political research models, establishing the scope of the research, and discussing appropriate implementation methods. This research uses a mixed-methods approach which combines qualitative analysis to understand the concept and context of Islamic political principles, and quantitative analysis to measure its impact on public policy and community participation. The characteristics of the proposed political research model involve a synthesis of political theory and religious studies, creating a solid conceptual foundation for this research. Through a comprehensive literature review, this research identifies varieties of Islamic political principles and defines the parameters used to measure their existence in the modern political context. The scope of the research includes in-depth analysis of key aspects such as the implementation of sharia, women's political participation, and the values of justice in the legal system.

Keywords: Political Research, Research Methodology, Existence of Islamic Politics, Basic Principles of Politics, Characteristics of Political Research Models, Scope.

PENDAHULUAN

Penelitian dalam bidang studi publik memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Model penelitian publik mencakup berbagai pendekatan dan metode yang digunakan untuk menyelidiki isu-isu yang relevan dengan kepentingan umum. Dalam konteks ini, penelitian publik menjadi instrumen vital dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk membuat keputusan yang berbasis bukti dan merumuskan kebijakan yang efektif.

Penelitian publik tidak hanya mencakup analisis data dan statistik, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan sosial dan kebijakan publik. Melalui pendekatan

ini, peneliti dapat menyusun model penelitian yang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai isu seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang pesat, penelitian publik juga berkembang dengan memanfaatkan sumber data baru seperti analisis data dan analisis prediktif untuk memahami trend dan pola perilaku masyarakat yang kompleks.

Salah satu aspek menarik yang menarik perhatian masyarakat adalah isu politik. Politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, sistem politik yang diterapkan di suatu negara atau pemerintahan memiliki dampak yang besar terhadap kedamaian dan harmoni dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, kegagalan sistem politik juga dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena pentingnya peran sistem politik dalam suatu negara, banyak ilmuwan telah melakukan studi dan penelitian untuk memahami aspek-aspek politik ini.

METODE

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: Pengumpulan data melalui pengamatan yang terstruktur terhadap unsur-unsur yang berbau politik. Analisis Konten: Memeriksa dan menganalisis teks, dokumen, atau media massa untuk mengidentifikasi pola atau tema politik. Studi Kasus: Mempelajari secara mendalam satu kasus atau kondisi tertentu untuk mencoba memahami konteks politik dan dinamika yang terlibat. Analisis Kuantitatif: Pendekatan statistik untuk menganalisis data politik dan mengidentifikasi pola atau hubungan yang signifikan. Analisis Kualitatif: Menggunakan suatu pendekatan yang deskriptif dan interpretatif untuk memahami makna dan konteks dalam sebuah fenomena politik. Studi Komparatif: Membandingkan beberapa sistem politik dari berbagai sudut pandang, kebijakan, atau situasi politik dari beberapa entitas untuk menemukan pola atau perbedaan. Analisis Kebijakan: Menganalisis proses produksi, implementasi, dan dampak kebijakan politik. Pemilihan metode tergantung pada pertanyaan penelitian, tujuan, dan sumber daya yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik

Politik memiliki akar kata dari bahasa Latin "politicus" dan bahasa Yunani "politicos," yang mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan warga negara atau warga kota dan berasal dari kata "polis" yang berarti kota. Dalam bahasa Inggris, "politic" secara harfiah merujuk pada tindakan bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, melibatkan kebijaksanaan dan tindakan yang bijak. Istilah ini juga mencakup seni pemerintahan atau tata kelola negara. Oleh karena itu, politik sering diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "politik" dapat diartikan sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan, termasuk sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan terkait pemerintahan negara atau hubungan dengan negara lain, cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Kata-kata turunan dari "politik", seperti "politikus" atau "politisi", merujuk kepada orang yang ahli di bidang politik atau ketatanegaraan, atau orang yang terlibat dalam aktivitas politik. Istilah "politisi" digunakan untuk menyatakan sifat yang bersangkutan

dengan politik atau berkaitan dengan urusan politik "Politisasi" adalah proses membuat suatu situasi, tindakan, atau gagasan memiliki dimensi politis, yang artinya melibatkan kebijakan dan pengaruh kekuasaan dalam konteks aktivitas atau kegiatan tersebut. Secara terminologi, politik adalah cara dan usaha untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat dengan menggunakan seperangkat undang-undang untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi kepentingan manusia.

Pada intinya, politik mencerminkan perilaku manusia, termasuk kegiatan, aktivitas, atau sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan masyarakat dengan

memanfaatkan kekuasaan. Meskipun kekuasaan bukan hakikat dari politik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan merupakan bagian tak terpisahkan dari politik; bahkan politik memerlukan kekuasaan agar kebijakan dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat (Nambo & Puluhuluwa. Dalam bahasa Arab, politik disebut siyasah yang merujuk pada pengaturan, pengelolaan, pemerintahan, serta pembuatan kebijakan. Arti ini menunjukkan bahwa siyasah memiliki tujuan untuk mengatur dan merumuskan kebijakan dalam konteks politik untuk mencapai tujuan tertentu. Fiqh yang membahas masalah ini dikenal sebagai fiqh siyasah.

Politik Islam merujuk pada kegiatan politik yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dengan menggunakan Islam sebagai landasan nilai dan dasar solidaritas kelompok. Hal ini dibedakan dengan agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, Budha, dan Hindu, yang hanya memberikan pedoman moral dan tidak mengajarkan sistem politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan sosial. Oleh karena itu, ketika agama-agama tersebut terlibat dalam politik dan pemerintahan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk "penyimpangan" atau "penodaan" terhadap ajaran agama. Ini karena aturan-aturan dalam agama-agama tersebut biasanya berasal dari akal dan nafsu manusia, bukan dari Tuhan, Islam, di sisi lain, dianggap sebagai agama yang komprehensif dan sempurna, mengatur setiap aspek kehidupan manusia mulai dari urusan sehari-hari seperti makan dan tidur hingga masalah besar seperti politik, hukum, dan ekonomi. Dalam Islam, ajaran agama

Bersifat menyeluruh (syamil) dan sempurna (kamil), tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Oleh karena itu, politik Islam merupakan upaya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik dan sosial, dengan keyakinan bahwa Islam memberikan pedoman yang komprehensif untuk menjalankan tatanan masyarakat dan negara.

B.Eksistensi Politik Dalam Islam

Dikalangan masyarakat islam pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dengan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena Banyak orang yang mengaku beragama Islam namun sering kali kurang memahami sepenuhnya tentang eksistensi ajaran Islam itu sendiri. Mereka melupakan bahwa Islam bukan hanya sekadar keyakinan pribadi, tetapi juga merupakan agama kolektif. Sebagai sebuah komunitas, Islam memiliki kesadaran kolektif, struktur organisasi, dan kemampuan untuk bertindak bersama.

Ketika Nabi Muhammad Saw berada di Madinah, beliau tidak hanya berfungsi sebagai Rasul Allah, tetapi juga sebagai kepala negara. Sebagai pemimpin negara, setelah wafatnya, posisinya harus diisi oleh orang lain untuk melanjutkan kepemimpinan negara yang ditinggalkannya. Beberapa peneliti sejarah politik mengkategorikan bahwa pola politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad memiliki unsur teo-demokratis. Artinya, dalam menghadapi setiap permasalahan, pertama-tama dilakukan musyawarah, baru kemudian menunggu ketetapan dari Tuhan. Hal ini dimungkinkan karena pada masa itu, wahyu masih terus turun dan memberikan panduan.

Keberadaan politik islam selanjutnya dapat pula dilihat dari munculnya berbagai teori politik. Khususnya khalifah dan imamiyah yang diajukan Berbagai kelompok memiliki sudut pandang politik yang berbeda-beda. Berbagai aliran politik, teologi, dan bahkan filsuf telah membicarakan tentang politik. Oleh karena itu, dalam teori-teori mereka, jabatan-jabatan negara dianggap khusus untuk keturunan Nabi Muhammad dan keluarganya, atau bahkan hanya untuk suku Quraisy. Namun, karena identifikasi suku Quraisy secara etnis dan geografis sulit diidentifikasi dengan jelas, kriteria-kriteria ini diperluas menjadi kualifikasi yang lebih umum dan bersifat kualitatif.

Dalam era modern, umat Islam dihadapkan pada tantangan kolonialisme dan modernisme dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, masalah aliran pemikiran Islam menjadi kompleks. Pendekatan yang bijaksana adalah melihat semua aliran tersebut sebagai bagian dari tradisi Islam.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam

Pertama, sistem musyawarah (as-Syurah) yang terdapat dalam Surat Asy-Syura (42:38) dalam Al-Quran berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

"Dan orang-orang yang memberikan jawaban kepada panggilan Tuhan mereka, mendirikan shalat, dan urusan mereka diserahkan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Menurut Khalil Abdul Karim, konsep syura merupakan sistem asli Arab yang merupakan tradisi yang telah ada dalam suku-suku Arab sejak zaman dahulu dan turun-temurun hingga saat ini. Sistem ini tidak muncul untuk menguasai kepemimpinan suku atau kepala suku, melainkan sebagai mekanisme untuk menyaring ide-ide terbaik dan terunggul. Praktik ini terjadi di lembaga Majelis Permusyawaratan Suku. Kata "syura" dalam bahasa Arab merujuk pada proses mengumpulkan orang-orang yang dianggap memiliki kecerdasan, kemampuan argumen, pengalaman, serta pemahaman mendalam, dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat yang bijaksana dan keputusan yang tepat.

Musyawarah juga bisa diartikan sebagai wadah untuk bertukar pikiran, gagasan, dan ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam rangka mencari solusi suatu masalah sebelum sampai pada pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan, musyawarah adalah prinsip konstitusional yang diwajibkan dalam politik Islam. Tujuannya adalah mencegah terjadinya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai prinsip konstitusional, musyawarah dalam politik Islam berfungsi sebagai pengendali atau pencegah kebijakan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.

Kedua, prinsip keadilan (al-Adl) merupakan prinsip penting dalam politik Islam. Keadilan dalam konteks Islam memiliki makna yang unik dan tidak dapat dibandingkan dengan keadilan dalam sistem lainnya. Seperti halnya musyawarah, prinsip keadilan ini juga diambil dari ajaran al-Qur'an. Dalam Islam, keadilan melibatkan lima aspek, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah keadilan Allah SWT yang bersifat mutlak, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Ali Imran [3] ayat ke 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْإِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Prinsip keadilan dalam politik Islam mencakup konsep yang sangat berharga. Keadilan ini tidak sama dengan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Pendekatan keadilan manusia dengan doktrin humanisme cenderung mengabaikan nilai-nilai transendental dan terlalu membesarkan peran manusia sebagai individu, membuat manusia menjadi pusat perhatian.

Namun, dalam konsep keadilan politik Islam, manusia ditempatkan pada kedudukan yang seimbang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Manusia bukanlah pusat dari segalanya; sebaliknya, manusia adalah hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Dalam ajaran Islam, hanya Allah SWT yang menduduki posisi pusat.

Oleh karena itu, keadilan dalam konteks humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, yaitu berfokus dan berpusat pada Allah, Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh konsep keadilan versi manusia. Selanjutnya, prinsip ketiga adalah al-Hurriyah (kemerdekaan/kebebasan yang bertanggung jawab). Kebebasan yang bertanggung jawab pada dasarnya mencakup kebebasan hati nurani.

D. Karakteristik Model Penelitian Politik

Penelitian politik melibatkan studi mendalam tentang proses, struktur, dan perilaku politik dalam masyarakat. Karakteristik utama dari model penelitian politik melibatkan pendekatan ilmiah yang berfokus pada aspek-aspek berikut:

1. Interdisipliner: Penelitian politik mencakup konsep dan teori dari berbagai bidang seperti ilmu politik, sejarah, ekonomi, sosiologi, hukum, dan ilmu lainnya. Ini mencerminkan kompleksitas politik yang melibatkan banyak aspek kehidupan manusia.

2. Pendekatan Ilmiah: Penelitian politik berbasis pada metode ilmiah, yang mencakup perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis statistik, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti empiris.

3. Teoritis: Penelitian politik mencoba untuk mengembangkan dan menguji teori-teori politik. Teori ini dapat berkisar dari teori politik klasik hingga pendekatan kontemporer yang mencerminkan dinamika politik saat ini.

4. Deskriptif dan Analitis: Penelitian politik bisa bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan politik, atau analitis, yaitu menganalisis sebab-akibat dari peristiwa politik atau kebijakan publik.

5. Kuantitatif dan Kualitatif: Penelitian politik dapat melibatkan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan data berupa angka dan statistik, atau pendekatan kualitatif, yang menggali makna dan interpretasi melalui wawancara, observasi, atau analisis teks.

6. Komparatif: Penelitian politik sering kali melibatkan perbandingan antara sistem politik, kebijakan, atau perilaku politik di berbagai negara atau wilayah. Hal ini membantu memahami perbedaan dan kesamaan dalam dinamika politik global.

7. Relevan secara Sosial: Penelitian politik harus relevan secara sosial dan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang berguna bagi masyarakat, pembuat kebijakan, dan ilmuwan politik lainnya.

8. Kritis dan Etis: Penelitian politik juga mencakup aspek kritis dan etis, yaitu penilaian kritis terhadap sumber data dan metodologi yang digunakan, serta memastikan bahwa penelitian tersebut dijalankan dengan integritas dan kejujuran.

Penting untuk diingat bahwa penelitian politik adalah bidang yang sangat luas dan mencakup berbagai topik, metode, dan pendekatan. Oleh karena itu, karakteristik-karakteristik ini dapat bervariasi tergantung pada fokus dan tujuan penelitian yang dilakukan.

E. Ruang Lingkup Model Penelitian Politik

Ruang lingkup model penelitian politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan ilmu politik. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang umum dalam model penelitian politik:

1. Teori Politik: Melibatkan pengembangan, uji coba, dan penafsiran teori politik. Ini bisa mencakup teori demokrasi, teori keadilan, teori kebijakan publik, dan teori-teori lainnya yang mencoba menjelaskan fenomena politik.
2. Sistem Politik: Meneliti struktur dan fungsi sistem politik dalam suatu negara, termasuk konstitusi, partai politik, lembaga legislatif dan eksekutif, dan sistem hukum.
3. Hubungan Internasional: Memeriksa interaksi politik dan ekonomi antara negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam konteks global.
4. Kebijakan Publik: Mempelajari pembuatan, implementasi, dan dampak kebijakan publik di berbagai tingkat pemerintahan. Ini mencakup analisis kebijakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.
5. Perilaku Politik: Memahami perilaku pemilih, partisipasi politik, dan kepemimpinan politik. Ini melibatkan studi mengenai pemilihan umum, psikologi politik, dan mobilisasi massa.
6. Politik Perbandingan: Membandingkan sistem politik, budaya politik, dan kebijakan antara berbagai negara. Studi ini mencoba untuk menemukan pola, perbedaan, dan kesamaan dalam politik negara-negara yang berbeda.
7. Politik Identitas: Meneliti peran identitas sosial, seperti etnisitas, agama, gender, dan orientasi seksual dalam politik. Ini mencakup analisis mengenai bagaimana identitas mempengaruhi preferensi politik dan partisipasi.
8. Politik Lingkungan: Memeriksa interaksi antara politik dan lingkungan, termasuk kebijakan perlindungan lingkungan, perubahan iklim, dan konflik sumber daya alam.
9. Politik Global dan Keamanan: Mempelajari isu-isu global seperti perdagangan internasional, konflik bersenjata, keamanan nasional, dan organisasi keamanan internasional.
10. Politik Hak Asasi Manusia: Memeriksa isu-isu hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, advokasi hak asasi manusia, dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional.

Ruang lingkup penelitian politik sangat luas dan mencakup banyak sub-bidang. Peneliti politik dapat memilih untuk memfokuskan penelitian mereka pada salah satu aspek ini atau memadukan beberapa aspek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena politik.

F. Tata Cara Model Penelitian Politik

Tata cara model penelitian politik melibatkan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian dalam konteks ilmu politik. Berikut adalah tata cara umum yang biasanya diikuti dalam model penelitian politik:

1. Penentuan Masalah Penelitian:
 - Identifikasi Topik: Pilih topik penelitian yang relevan dan menarik minat.
 - Rumuskan Pertanyaan Penelitian: Tentukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian.
2. Review Literatur:

- Identifikasi Karya Terdahulu: Tinjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian Anda.
 - Analisis Literatur: Tinjau dan analisis kritik terhadap literatur yang ada.
3. Perumusan Hipotesis atau Arah Penelitian:
- Perumusan Hipotesis: Jika memungkinkan, rumuskan hipotesis berdasarkan pertanyaan penelitian Anda.
 - Rumuskan Arah Penelitian: Jika penelitian bersifat eksploratif, tentukan arah penelitian tanpa hipotesis yang jelas.
4. Desain Penelitian:
- Metode Penelitian: Pilih metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, campuran) yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian.
 - Pemilihan Sampel: Tentukan populasi dan metode pengambilan sampel yang sesuai.
 - Instrumen Pengumpulan Data: Bangun instrumen survei, wawancara, atau observasi, dan pastikan validitas dan reliabilitasnya.
5. Pengumpulan Data:
- Implementasikan Instrumen: Lakukan survei, wawancara, atau observasi sesuai dengan desain penelitian yang telah dibuat.
 - Catat Data: Lakukan pencatatan data dengan cermat dan terorganisir.
6. Analisis Data:
- Proses Data: Gunakan perangkat lunak statistik atau teknik analisis kualitatif untuk menganalisis data.
 - Interpretasi Hasil: Berikan interpretasi logis terhadap hasil analisis.
7. Penarikan Kesimpulan:
- Kaitkan dengan Pertanyaan Penelitian: Tentukan apakah hasil mendukung atau menolak hipotesis atau pertanyaan penelitian.
 - Diskusikan Implikasi: Diskusikan implikasi temuan terhadap ilmu politik atau masyarakat secara lebih luas.
8. Penulisan Laporan Penelitian:
- Struktur Laporan: Tulis laporan penelitian dengan struktur yang jelas, termasuk pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan.
 - Referensi: Sertakan daftar referensi yang lengkap dari literatur yang dikonsultasikan.
9. Presentasi dan Diseminasi:
- Persentasi Hasil: Sajikan hasil penelitian dalam seminar, konferensi, atau forum ilmiah lainnya
 - Publikasi: Ajukan artikel penelitian ke jurnal ilmiah untuk publikasi peer-reviewed.
10. Evaluasi dan Revisi:
- Evaluasi Metodologi: Evaluasi metode yang digunakan dan pertimbangkan apakah ada perubahan yang dapat meningkatkan desain penelitian.
 - Revisi dan Perbaikan: Lakukan revisi laporan berdasarkan umpan balik dan evaluasi. Mematuhi langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa penelitian politik Anda

dilakukan secara sistematis, akurat, dan dapat dipercaya. Penting juga untuk mengikuti etika penelitian yang berlaku dan menghormati hak dan privasi peserta penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Model penelitian politik adalah pendekatan ilmiah yang kompleks dan terstruktur untuk memahami dinamika politik dalam masyarakat. Dalam prosesnya, peneliti politik mempertimbangkan berbagai teori, metode, dan konsep untuk mengungkap realitas politik. Melalui tata cara yang sistematis, penelitian politik membuka jendela ke dalam perilaku pemilih, kebijakan publik, konflik politik, dan dinamika sistem politik global.

Dalam menyusun model penelitian politik, penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas, merinci metodologi dengan cermat, dan menginterpretasikan data dengan teliti. Melalui penelitian politik, kita mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana politik mempengaruhi kehidupan sehari-hari, bagaimana kebijakan merespon tuntutan masyarakat, dan bagaimana struktur politik membentuk identitas sosial dan budaya.

Terus mengembangkan metode penelitian politik, terutama dalam menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan campuran ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Penerbit NEM.
- Jovani, A. (2021). *Modul 1 Ilmu Politik: Ruang Lingkup Dan Konsep Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik*.
- Permana, R. Y. (2020). *Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman*. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Sagena, U., Lawelai, H., & Dema, H. (2023). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi Berbasis Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nata, Abudin, 2013, Metode Penelitian Islam.